

ASLI *he*

JUR. EK. PEMBANGUNAN 08-08-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

**PENGARUH INDIKATOR KEUANGAN DAERAH TERHADAP SISA
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2021**



Skripsi Oleh :

Rachmad Wibisono

01021181621031

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Pengaruh Indikator Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-3021

Disusun oleh:

Nama : Rachmad Wibisono

NIM : 01021181621031

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

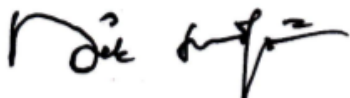
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam Lanjutan Ujian Komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing I

Tanggal: **4 Januari 2023**

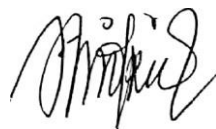


Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing II

Tanggal: **5 Januari 2023**



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.
NIP. 196903142014092001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengaruh Indikator Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-3021

Disusun Oleh:

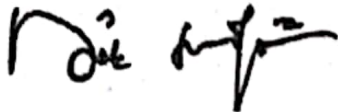
Nama : Rachmad Wibisono
Nim : 01021181621031
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 31 Juli 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 31 Juli 2023

Ketua

Anggota



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.
NIP. 196903142014092001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 8-8-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rachmad Wibisono
NIM : 01021181621031
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
Pengaruh Indikator Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021

Pembimbing :

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
Anggota : Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
Hari/Tanggal Ujian : Senin, 31 Juli 2023


Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan saya terbukti tidak benar di kemudian hari, saya bersedia jika predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya dicabut.


Indralaya, 31 Juli 2023

Pembuat pernyataan,




Rachmad Wibisono

NIM. 01021181621031

ASLI 
JUR. EK. PEMBANGUNAN 8-8-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“PENGARUH INDIKATOR KEUANGAN DAERAH TERHADAP SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2021”*** ini disusun untuk melengkapi syarat penyelesaian studi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi program Strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan dan pelaksanaan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam beberapa komponen, karenanya penulis berharap diberi kritik dan saran yang membangun dari pembaca sehingga terjadi penyempurnaan pada skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini bisa memberi manfaat yang positif bagi berbagai pihak yang membacanya.

Indralaya, 31 Juli 2023

Penulis



Rachmad Wibisono

NIM. 01021181621031

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari kendala dan halangan yang dilewati. Adapun kendala tersebut dapat terselesaikan dengan dukungan, bimbingan, perhatian, bantuan baik moril maupun materil dan semangat yang tiada henti serta doa tulus dari berbagai pihak yang terlibat, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi, antara lain kepada :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkah dan rahmat ALLAH SWT yang selalu menjadi tempat peneliti mengadu segala keluh, kesah, dan syukur selama masa penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Suwarno dan Yetti Herlin Mustika untuk beliau skripsi ini penulis persembahkan. Serta untuk saudara dan saudari saya Rizki Yulianto serta Wulan Septiyani dan keluarga terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan dalam membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.S.i selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si. selaku

Dosen Wali sekaligus kordinator jurusan yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.

5. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta menguji saya dalam ujian.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis hingga mencapai tahap ini.
9. Seluruh staf akademik jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah membantu penulis.
10. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2016 Kampus Indralaya yang selalu memberi warna dalam proses perkuliahan saya.

11. Teman-teman Konsentrasi Ekonomi Keuangan Daerah 2016 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan selama beberapa semester.

12. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan, M. Iskandar, Ari Sanjaya, Rahayu, Syndi Putri Maisherlly, Pikram Basthonie, Muhammad Febrianza Wiranata, Panji Agung Pratama, Yogi danindra, Jefri Ramanda Putra, Muhammad Hasbi, Nicholas Wimarda Vinenko, Muhammd Saleh, Dimas Putra Erdana, Muhammad Rifki Tahta, Dio Fatra Utama, Muhammad Syukron Jamil, Muhammad Irwanto, Ariansyah Putra, Arie Wahyu hidayat, Yensen Tobing dan Alwi Alkaf yang telah memberikan keceriaan, hiburan dan menjadi teman *refreshing* saat saya hilang semangat dalam menjalani perkuliahan dan saat proses menyusun skripsi.

ABSTRAK

PENGARUH INDIKATOR KEUANGAN DAERAH TERHADAP SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2021

Oleh:

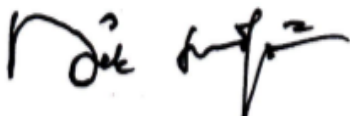
Rachmad Wibisono; Didik Susetyo; Siti Rohima

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal dan efisiensi fiskal terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data *cross section* yaitu data 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan data *time series* yaitu data tahun 2013-2021. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda data panel dengan menggunakan *Random Effect Model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 0.009121 dan signifikan, ketergantungan fiskal berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 0.022796 dan signifikan, efisiensi fiskal berpengaruh negatif dengan koefisien sebesar -0.012106 dan tidak signifikan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2021.

Kata Kunci: *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA), Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Efisiensi Fiskal.*

Ketua

Anggota



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.
NIP. 196903142014092001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP.197304062010121001

ABSTRACT

INFLUENCE OF DAILY FINANCIAL INDICATORS ON BUDGET OVERRUNNING (SiLPA) IN SOUTH SUMATERA PROVINCE DISTRICT / CITY YEAR 2013-2021

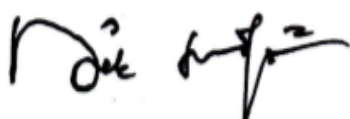
By :

Rachmad Wibisono ; Didik Susetyo ; Siti Rohima

This study aims to determine the effect of fiscal independence, fiscal dependence and fiscal efficiency on the remaining budget surplus (SiLPA) in the Regency / City of South Sumatra Province. This study uses panel data consisting of cross section data, namely data from 17 regencies / cities in South Sumatra Province and time series data, namely data from 2013-2021. This study uses panel data multiple linear regression using the Random Effect Model. The results of this study indicate that fiscal independence has a positive effect with a coefficient of 0.009121 and is significant, fiscal dependence has a positive effect with a coefficient of 0.022796 and is significant, fiscal efficiency has a negative effect with a coefficient of -0.012106 and is not significant to the remaining budget surplus (SiLPA) in the Regency / City in South Sumatra Province in 2013-2021.

Keywords: *Residual Budget Surplus (SiLPA), Fiscal Independence, Fiscal Dependency, Fiscal Efficiency.*

Chairman



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003

Member



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.
NIP. 196903142014092001

Acknowledged,

Head of Development Economics Department



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Rachmad Wibisono
NIM	01021181621031
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	Palembang, 13 Januari 1999
Alamat	Komplek TNI AU Barak 16 No 04 Rt 013 Rw 004 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang
Agama	Islam
Status	Belum Menikah
Kewarganegaraan	Indonesia
Email	Rachmadwibisono45@gmail.com
No. Hp	085609299413
Pendidikan	
2004-2010	SD Negeri 140 Palembang
2010-2013	SMP Negeri 11 Palembang
2013-2016	SMA Negeri 13 Palembang
2016-2023	Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAN.....	12
2.1 LandasanTeori.....	12
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	12
2.2 Definisi dan Konsep.....	17
2.2.1 Kemandirian Fiskal.....	17
2.2.2 Ketergantungan.....	18
2.2.3 Efisiensi.....	18
2.2.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).....	19
2.3 Penelitian Terdahulu.....	21
2.4 Kerangka Pemikiran.....	24

2.5 Hipotesis.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.3.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	26
3.3.1.1 Kemandirian Fiskal.....	27
3.3.1.2 Ketergantungan.....	27
3.3.2 Analisis Regresi.....	29
3.3.2.1 Model Pooled Least Square atau Common Effect.....	31
3.3.2.2 Model Fixed Effect.....	31
3.3.2.3 Model Random Effect.....	32
3.3.2.4 Pengujian Dengan Chow Test.....	33
3.3.2.5 Pengujian Dengan Hausman Test.....	34
3.3.2.6 Pengujian Dengan LM Test (Lagrange Multiplier).....	35
3.3.2.7 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan).....	35
3.3.2.8 Uji Statistik t.....	36
3.3.2.9 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	37
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum.....	40
4.1.1 Geografis dan Wilayah.....	40
4.1.2 Kondisi Penduduk.....	43
4.1.3 Perkembangan kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	45
4.1.4 Perkembangan Ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	48
4.1.5 Perkembangan efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	54
4.1.6 Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	60
4.3 Uji Kesesuaian Model	64
4.3.1 uji Chow.....	64

4.3.2 uji Hausman	65
4.3.3 Uji Lagrange Multiplier.....	66
4.4 Uji Statistik	70
4.4.1 uji F.....	70
4.4.2 uji T.....	70
4.5 Koefisien Determinasi (R^2).....	71
4.6 Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	72
4.6.1 Pengaruh Kemandirian Fiskal Terhadap SiLPA.....	72
4.6.2 Pengaruh Ketergantungan Terhadap SiLPA.....	73
4.6.3 Pengaruh Efisiensi Terhadap SiLPA.....	74
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan SiLPA di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2021 dalam Satuan Miliar Rupiah.....	6
Tabel 1.2	Rasio Kemandirian Fiskal, Ketergantungan dan Efisiensi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 dalam Satuan Persen.....	8
Tabel 3.1	Kriteria Rasio Kemandirian.....	27
Tabel 3.2	Kriteria Rasio Ketergantungan.....	27
Tabel 3.3	Kriteria Rasio Efisiensi.....	28
Tabel 4.1	Daftar Kabupaten/Kota, Ibukota dan Luas Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.....	39
Tabel 4.2	Perkembangan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020 (Ribu Jiwa).....	42
Tabel 4.3	Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021 (dalam Persen)	43
Tabel 4.4	Ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021 (dalam Persen).....	49
Tabe 4.5	Efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021 (dalam Persen).....	55
Tabe 4.6	SiLPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021 (dalam satuan jutaan rupiah).....	61
Tabel 4.7	Hasil Estimasi Data Panel Menggunakan Metode <i>Common Effect Model</i> , <i>Fixed Effect Model</i> dan <i>Random Effect Model</i>	63
Tabel 4.8	Hasil Pemilihan Model Menggunakan Uji Chow.....	64
Tabel 4.9	Hasil Pemilihan Model Menggunakan Uji Hausman.....	65
Tabel 4.10	Hasil Pemilihan Model Menggunakan Uji Lagrange Multiplier ..	66
Tabel 4.11	Random Effect Model.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kurva Teori Peacock dan Wiseman.....	16
Gambar 2.2	Skema yang mempengaruhi SiLPA.....	25
Gambar 4.1	Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkembangan SiLPA di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021 dalam Satuan Miliar Rupiah.....	5
------------	---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Hasil Estimasi <i>Common Effect Model</i>	80
Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	81
Hasil Estimasi <i>Random Effect Model</i>	82
Hasil Uji Chow.....	83
Hasil Uji Hausman.....	84
Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan tata pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi ditandai dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dilakukan sejak Januari 2001. Dalam perkembangannya, kedua undang-undang tersebut disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pada saat ini telah disempurnakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut, menciptakan otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal dimana daerah otonom diberikan dan dilimpahkan wewenang oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber penerimaan dan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dalam penetapan prioritas pembangunan. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut yaitu perubahan terhadap pengelolaan keuangan daerah, melalui keberadaan dua undang-undang tersebut daerah memiliki wewenang untuk mengatur anggaran keuangan dengan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting dalam mengelola keuangan daerah di era otonomi sekarang ini, menurut Mardiasmo (2002) bahwa dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menggali dan mengelola kekayaan atau sumber daya daerah dengan efisien dan efektif sehingga

dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat di daerahnya. Sedangkan, Halim (2002) memberikan pengertian pengelolaan laporan keuangan daerah dengan lebih sederhana yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan definisi ini, pengelolaan laporan keuangan daerah pada dasarnya adalah aktivitas pengelolaan laporan keuangan oleh pemerintah daerah terkait dengan APBD.

Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan ini juga menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pada setiap akhir tahun anggaran pemerintah daerah wajib melakukan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

APBD ialah instrumen yang paling utama bagi pemerintah daerah, anggaran ini dapat membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, sebagai sumber peningkatan standar penilaian kinerja, media pembantu peningkatan motivasi para pegawai, mengatur pengeluaran di masa yang akan datang, penghubung seluruh aktivitas dari berbagai unit kerja, dan sebagai cara menentukan besar pendapatan dan pengeluaran (Mardiasmo, 2012). Oleh karena itu idealnya di dalam APBD harus mencerminkan kebutuhan

masyarakat atau kepentingan publik dengan berbagai potensi dan sumber daya riil yang dimiliki daerah serta pengeluaran untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Berdasarkan tahun ke tahun penetapan alokasi APBD mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan tersebut diasumsikan terjadi peningkatan pula pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, jika dalam proses pelanggaran dan pelaksanaan APBD tidak berjalan baik dengan kata lain alokasi APBD yang dianggarkan tidak diiringi dengan serapan yang optimal maka kesejahteraan masyarakat pun sulit tercapai. Kondisi APBD di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan cenderung meningkat baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja namun realisasi dari pelaksanaan alokasi tersebut terjadi ketidaksesuaian yaitu pada pos realisasi pendapatan melebihi estimasi anggaran dan pada pos realisasi belanja kurang dari alokasi anggaran. Kemunculan ketidaksesuaian tersebut berimbas pada beberapa program pemerintah tidak berjalan dengan optimal yang pada akhirnya terakumulasi menjadi SiLPA. SiLPA adalah sisa anggaran yang terjadi selama proses penatausahaan keuangan baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Prediksi SiLPA dapat diperkirakan di akhir tahun anggaran, namun baru ditetapkan setelah laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga nilai final SiLPA baru dapat diakomodir dalam perubahan APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 bahwa SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki SiLPA walaupun dalam anggarannya telah ditetapkan. Bila dalam realisasi anggaran SiLPAnya

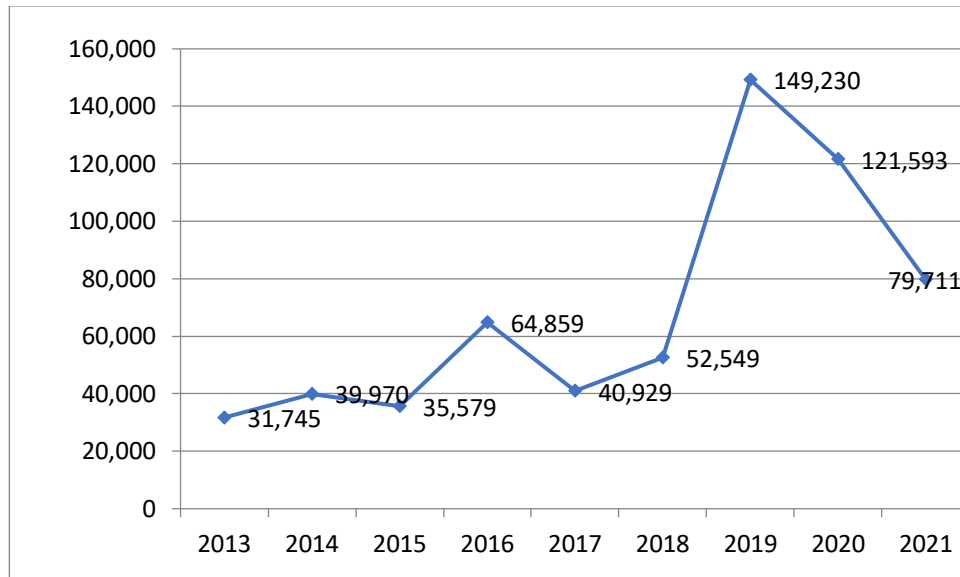
Surplus berarti realisasi pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, sedangkan bila dalam realisasi anggaran SiLPAny defisit berarti pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerahnya walaupun dalam pelaksanaannya defisit dalam realisasi anggaran belum tentu terjadi. Bila itu terjadi berarti pemerintah memerlukan penerimaan sebesar defisit kemudian sisa lebih pembiayaannya diperkirakan ialah nol.

Menurut pasal 137 penerimaan pembiayaan SiLPA tahun sebelumnya dapat digunakan:

1. Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung
2. Untuk membiayai tanggungan lainnya yang sampai akhir tahun belum diselesaikan.
3. Untuk menutupi kekurangan anggaran apabila belanja lebih besar daripada pendapatan.

Grafik 1.1

Perkembangan SiLPA di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021 dalam Satuan Miliar Rupiah



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan Grafik 1.1, perkembangan SiLPA di Provinsi Sumatera Selatan kondisinya selalu berfluktuatif atau tidak stabil, dimana keadaan ini tergantung pada penerimaan dan pengeluaran suatu daerah tersebut. Dilihat dari grafik di atas bahwa SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai Rp 149 miliar dan SiLPA terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 31 miliar. Semakin besar SiLPA menunjukkan kurang cermatan dalam penganggaran atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran, sehingga rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap.

Tabel 1.1

Perkembangan SiLPA di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-
2021 dalam Satuan Miliar Rupiah

KAB/KOTA	SiLPA								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Lahat	75.902	139.284	86.469	3.086	1.942	82.39	61.009	58.216	370.793
Kab. Musi Banyuasin	54.785	79.756	30.397	359.342	24.126	69.964	41.377	52.754	271.735
Kab. Musi Rawas	52.582	58.379	9.848	9.939	47.257	4.208	30.397	26.07	134.286
Kab. Muara Enim	58.217	137.406	41.377	24.044	125.172	91.223	82.901	72.018	572.481
Kab. Ogan Komering Ilir	22.987	70.035	9.036	7.971	14.772	35.55	30.863	36.012	165.58
Kab. Ogan Komering Ulu	84.782	108.844	60.834	88.621	94.775	55.195	77.335	64.012	42.207
Kota Palembang	76.983	142.596.	92.711	61.009	97.731	19.604	51.773	57.025	156.359
Kota Prabumulih	30.267	78.162	1.548	4.797	28.29	29.619	14.885	11.893	106.587
Kota Pagar Alam	23.895	49.773	11.765	8.77	6.251	113.845	34.971	30.782	111.78
Kota Lubuk Linggau	32.901	21.266	3.808	2.76	1.694	63.903	23.538	26.953	67.483
Kab. Banyuasin	64.89	80.459	61.303	81.912	73.079	72.419	90.143	35.218	28.352
Kab. Ogan Ilir	27.199	19.017	35.812	23.529	30.894	42.95	53.846	60.121	138.324
Kab. OKU Timur	25.016	38.324	1.461	1.041	17.809	12.249	19.327	31.089	42.207
Kab. OKU Selatan	77.329	155.557	64.053	6.964	25.48	17.615	23.008	25.097	76.374
Kab. Empat Lawang	32.908	37.991	955	11.592	16.329	10.533	12.893	18.647	7.251
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	28.901	14.424	2.429	3.573	31.731	1.7	7.129	14.302	234.615
Kab. Musi Rawas Utara	47.234	68.482	11.487	102.215	54.417	43.585	55.007	44.892	116.984

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.1, perkembangan SiLPA di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan kondisinya mengalami peningkatan dan juga penurunan setiap tahunnya, keadaan ini tergantung pada selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Bila dilihat dari tabel tersebut pada tahun 2013 SiLPA tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp 84 miliar dan yang terendah terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp 22 miliar. Pada tahun 2014 SiLPA tertinggi terjadi di Kabupaten

OKU Selatan sebesar Rp 155 miliar dan yang terendah terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp 14 miliar. Pada tahun 2015 SiLPA tertinggi terjadi di Kota Palembang sebesar Rp 92 miliar dan yang terendah terjadi di Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 955 juta. Pada tahun 2016 SiLPA tertinggi terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp 359 miliar dan yang terendah terjadi di Kabupaten OKU Timur sebesar Rp 1 miliar. Pada tahun 2017 SiLPA tertinggi terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 125 miliar dan yang terendah terjadi di Kota Lubuk Linggau sebesar Rp 1,6 miliar. Pada tahun 2018 SiLPA tertinggi terjadi di Kota Pagar Alam sebesar Rp 113 miliar dan yang terendah terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp 1,7 miliar. Pada tahun 2019 SiLPA tertinggi terjadi di Kabupaten Banyuasin sebesar Rp 90 miliar dan yang terendah terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp 7 miliar. Pada tahun 2020 SiLPA tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp 64 miliar dan yang terendah terjadi di Kota Prabumulih sebesar Rp 11 miliar. Pada tahun 2021 SiLPA tertinggi terjadi di Kabupaten Lahat sebesar Rp 370 miliar dan yang terendah terjadi di Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 7 miliar. SiLPA yang semakin besar menunjukkan perencanaan yang kurang baik atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran.

Tabel 1.2

Rasio Kemandirian Fiskal, Ketergantungan dan Efisiensi di Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 dalam Satuan Persen

KAB/KOTA	Kemandirian Fiskal	Ketergantungan	Efisiensi
Kab. Lahat	10.9	32.3	90.5
Kab. Musi Banyuasin	6.1	59.3	111.9
Kab. Musi Rawas	12.9	57.9	106.8
Kab. Muara Enim	9.4	43.0	99.2
Kab. Ogan Komering Ilir	11.4	48.8	94.6
Kab. Ogan Komering Ulu	8.9	40.7	95.2
Kota Palembang	47.5	53.1	96.0
Kota Prabumulih	9.2	35.6	105.9
Kota Pagar Alam	2.3	7.1	98.2
Kota Lubuk Linggau	7.4	21.1	97.6
Kab. Banyuasin	8.1	20.7	104.5
Kab. Ogan Ilir	5.4	31.7	92.5
Kab. OKU Timur	6.4	26.1	95.8
Kab. OKU Selatan	4.3	33.0	98.0
Kab. Empat Lawang	5.1	23.7	104.7
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2.9	5.8	96.8
Kab. Musi Rawas Utara	4.0	21.8	89.1

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2, rasio kemandirian fiskal tahun 2014 terdapat 1 daerah yang memiliki kriteria rendah yaitu pada Kota Palembang dan 16 daerah lainnya memiliki kriteria sangat rendah dimana semakin tinggi angka kemandirian ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Pada rasio ketergantungan terdapat 2 daerah yang memiliki kriteria sangat rendah yaitu Kota Pagar Alam dan Kabupaten PALI. Ada 5 daerah yang memiliki kriteria sedang yaitu Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas

Utara. Ada 4 daerah yang memiliki kriteria cukup yaitu Kabupaten Lahat, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Selatan. Ada 3 daerah yang memiliki kriteria tinggi yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ada 3 daerah yang memiliki kriteria sangat tinggi yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas dan Kota Palembang dimana semakin tinggi angka rasio ketergantungan ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi angka ketergantungan daerahnya. Pada rasio efisiensi terdapat 5 daerah yang memiliki kriteria tidak efisien yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Empat Lawang. Ada 11 daerah yang memiliki kriteria kurang efisien yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten PALI. Ada 1 daerah yang memiliki kriteria cukup efisien yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dimana semakin kecil angka efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bali (2013) menyebutkan bahwa beberapa faktor keberadaan SiLPA diduga karena terjadinya kelebihan pendapatan yang tidak terhitung pada realisasi anggaran dan rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang terindikasi terlibat dalam pembentukan SiLPA adalah adanya penghematan belanja karena program pemerintah yang tidak terlaksana yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran pemerintah. Selain itu keberadaan

SiLPA juga menjadi dilema bagi pengelolaan keuangan daerah karena besarnya SiLPA bisa mengindikasikan hal yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, SiLPA ini perlu dihindari karena pada dasarnya SiLPA merupakan dana menganggur (*idle fund*), apabila tidak dimanfaatkan secara cermat, tidak akan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh indikator keuangan daerah terhadap SiLPA di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2013 - 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis indikator keuangan daerah terhadap SiLPA di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2013 – 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah khususnya sisa lebih perhitungan anggaran.

2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberi penjas mengenai faktor terjadinya SiLPA sehingga dapat menjadi masukan bagi kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang optimal.

Daftar Pustaka

<http://www.djpk.depkeu.go.id/>

- Arif, Emkhad., (2013). Tesis. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan APBD Kabupaten /Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*. Magister Sains dan Doktoral. UGM.
- Asngari, Imam. (2014). *Modul Latihan Dasar Program Eviews*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Baay, Tri Adiyanto. (2011). '*Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009*'. Tesis. Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada.
- Bali, Thomas Tuba. (2013). Tesis. *Analisa Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Manajemen Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. MAKSI-UGM.Yogyakarta.
- Danayanti, Mauli. (2014). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Realisasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar Muda dan Revmianson Naibaho. (2018). *Variables Influencing Allocation of Capital Expenditure in Indonesia*. Accounting Department, faculty of Economics and Business, Universitas Sumatera Utara.
- Kamelia, Mely. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dan Strategi Untuk Meminimalisirnya Pada APBD Kabupaten Bogor*. Thesis. Institut Pertanian Bogor.
- Lewis, Blane D. (2005). *Indonesian Local Government Spending, Taxing and Saving: An Explanation of Pre ad Post-decentralization on Fiscal Outcomes*, Asian Economic Journal 2005, Vol. 19 No. 3.
- Mappanyuki, R. (2015). *The Effect of Surplus Budget Financing, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Revenue, and Characteristics of Local Government on Decision of Capital Expenditure (Survey in Local Government in Indonesia)*. Journal of

Finance and Accounting Department of Accounting, Mercubuana University. Vol 6 No 9.

Riyanto, Agus. (2012). *Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010*, SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 12, No. 2, Juli 2012.

Simamora, Sihar. (2014). *Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah: Dalam Prespektif Teoritis*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Volume 14 No. 2 / September 2014.

Susetyo, Didik. (2009). *Implikasi Ekonomi Atas Opini Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Sriwijaya, Volume 7, No 1. 1–13.

Susetyo, Didik. (2008). *Kinerja APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Sriwijaya, Volume 6, No 1. 39–53.

Syaparudin dan Syamsuddin, (2013). *Kinerja Keuangan Daerah dan Hubungan Dengan SiLPA di Kabupaten Bungo*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol 1 No1, Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jambi.

Usman. (2013). Tesis. *Analisis Proses dan Pola Terbentuknya SiLPA di Kabupaten Sumbawa*. Malang: Magister Ilmu Ekonomi UB.

Virgasari, Aviva. (2009). *Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.

Witri. (2011). *"Analisis SiLPA pada Perhitungan APBD Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2009"*. Tesis S2. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.